

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teoritis

1.1 Teori Konsep Kekuasaan Menurut Nicholo Machiavelli

Machiavelli menjelaskan konsep Kekuasaan sesuai dengan apa yang dialami oleh manusia secara langsung. Kekuasaan dalam hal ini menurut Machiavelli memiliki tingkatan yang berbeda dengan nilai dan moralitas. Machiavelli meyakini bahwa nilai dan moralitas harus memiliki pengaruh terhadap menguatnya kekuasaan, yang artinya bahwa baik nilai maupun moralitas haruslah memiliki nilai guna bagi kekuasaan, jika berlaku sebaliknya, maka nilai dan moralitas lebih baik dikesampingkan.¹⁸ Menurut pandangan Machiavelli, kekuasaan bukan sesuatu yang digunakan untuk tunduk pada nilai kebajikan, rasa adil dan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, melainkan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat agar tunduk dan patuh pada kepentingan negara. Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan memiliki tujuan untuk memberikan keselamatan bagi kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan, terlepas dari pentingnya moralitas dan nilai dalam kehidupan bernegara. Disini Machiavelli betul-betul menjadikan negara sebagai obyek utama dalam gagasannya.

Gagasan terkait pegabaian nilai moralitas Machiavelli dalam berpolitik ia jelaskan dalam tulisannya, dalam tulisannya ia menyarankan kepada para penguasa jikalau seorang penguasa diperbolehkan untuk melakukan tindakan kekerasan dan kekejaman dalam proses kekuasaannya, maka jangan terlalu

¹⁸ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Hlm. 133

sering dilakukan, Machiavelli menyarankan untuk sesekali menggunakan metode persuasif jika perlu untuk menarik simpati masyarakat.¹⁹ Penguasa disini digambarkan sebagai aktor utama dalam konsep kekuasaan yang diemukakan oleh Machiavelli, penguasa berhak melakukan apapun selama itu demi kepentingan negara. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa Machiavelli terkenal sangat obsesif terhadap negara. Terbukti dengan pengabaianya terhadap konsep moralitas dan agama dalam bernegara. Hal itu tertuang pada salah satu penggalan tulisannya dalam catatan *Il Principe* :

*“Seorang pangeran harus mampu bermain baik sebagai manusia, maupun sebagai binatang buas ... Sang pangeran harus bisa memakai kedua kodrat itu ... yang satu tanpa lainnya tidak dapat ada.”*²⁰

Dari perspektif sejarah pemikiran politik barat, gagasan Machiavelli ini merupakan bentuk pemisahan secara total antara gagasan modern dengan gagasan lampau/tradisional, gagasan tradisional lebih megedepankan nilai-nilai keadilan dari pemerintah serta memelihara nilai tersebut dan menyalurkannya ke seluruh penjuru negeri, nilai-nilai tersebut tidak masuk ke dalam skema pemikiran Machiavelli yang jelas-jelas tidak memperhatikan nilai keadilan atau moralitas sebagai satu hal yang utama,²¹ artinya, Machiavelli telah membuat sebuah gagasan baru yang terlepas sepenuhnya dari pengaruh gagasan yang dibuat oleh pemikir-pemikir pada abad pertengahan (salah satunya adalah

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 135

²⁰ Kutipan dari *Il Principe* Bab 18 dalam Budi Hardiman, *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern*, Hlm. 17

²¹ Dr. M. Sastrapratedja & Drs. Frans M. Parera, *Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa*, Hlm. 35

gagasan dari Santo Augustinus dan Thomas Aquinas) yang menjadikan gagasan Machiavelli ini menjadi ciri penting abad renaisans.²² Gagasan masa lampau terkait kekuasaan masih tergolong humanis dan mengedepankan peran agama dalam proses kerjanya, berbanding terbalik dengan pendapat Machiavelli yang mengharapkan sebaliknya, jika agama dan moral ingin memiliki tempat dalam negara, maka kedua hal tersebut haruslah memiliki nilai guna bagi kekuasaan/pemerintah.

Karena menurut pandangan Machiavelli, tugas utama pemerintah yang sebenarnya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan dan bagaimana pemerintah melakukan ekspansi kekuasaan agar kekuatan negara bisa dominan. Tujuan pemerintah adalah menstabilkan suatu negara, Machiavelli berpendapat bahwa penguasa bukanlah perwujudan dari nilai-nilai moralitas maupun agama²³.

Dengan pandangan tersebut, bisa dikatakan bahwa Machiavelli memiliki pemikiran yang hampir sejalan dengan Nietzsche, bedanya hanya dari posisi moralitas yang mana menurut Nietzsche itu digunakan sebagai kedok bagi kekuasaan, semetara bagi Machiavelli, moralitas bisa mendapat perhatian sejauh ia mampu berguna bagi kekuasaan.

Gagasan Machiavelli ini pada akhirnya diadopsi oleh Hitler, seperti dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi (2001 : 132), bahwa gagasan Machiavelli ini banyak digunakan oleh negarawan-negarawan terkenal dunia, ada yang terang-terangan mengakui bahwa ia mengadopsi gaya

²² Ahmad Suhelmi, *Op.Cit.*, Hlm. 132

²³ Dr. M. Sastrapratedja & Drs. Frans M. Parera, *Op.Cit.*, Hlm. 36

kepemimpinan sesuai dengan gagasan Machiavelli, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Dan salah satu yang paling terang-terangan mengadopsi gaya kepemimpinan sesuai dengan tulisan Machiavelli adalah Hitler.²⁴ Bisa dilihat dari bagaimana ia memimpin Jerman, dari sejak awal ia masuk ke partai hingga pada akhirnya menginjakkan kaki di gedung pemerintahan Jerman sebagai seorang kanselir. Hitler menggunakan berbagai cara untuk mencapai kekuasaannya, namun dalam sejarahnya, Hitler tidak menggunakan cara kotor untuk merengkuh kekuasaan, ia masih menggunakan jalan sesuai prosedur sehingga dalam prosesnya bisa dibilang Hitler tidak ada masalah sama sekali, karena secara teknis ia mengikuti bagaimana alur yang seharusnya yakni melalui pemilihan.

Secara spesifik ada beberapa pandangan Machiavelli yang jelas-jelas diadopsi Hitler dan digunakan olehnya untuk menguasai Jerman, pandangan-pandangan tersebut ialah pandangan mengenai politik agama dan moralitas, dan moralitas, Hitler tidak memandang agama sebagai sesuatu yang penting, dalam praktik pemerintahannya, Hitler jarang menyinggung agama karena tidak ada keterkaitan antara agama dengan supremasi ras yang ia tuju. Sementara moralitas lebih jelas lagi, Hitler sama sekali tidak memperdulikan bagaimana orang lain memandang pemerintahannya, ketika itu bisa memudahkan jalannya untuk mencapai supremasi ras yang diinginkan, maka itulah yang akan digunakan, pun sebaliknya, jika tidak, maka itu harus di musnahkan, itulah yang dianggap sebagai bibit-bibit fasisme yang nantinya berkembang di Jerman.

²⁴ Ahmad Suhelmi, *Op.Cit.*, Hlm. 132

Kedua, yakni pandangan soal militer dan patriotisme, jika kita membaca tulisan Machiavelli, maka akan kita temukan bentuk kekecewaan Machiavelli terhadap negaranya (Italia) pada saat itu yang tidak memperkuat militernya dan lebih memilih tentara bayaran yang tidak memiliki patriotisme yang tinggi terhadap negara, tentara bayaran rentan melakukan penyelewengan, karena mereka bekerja atas dasar bayaran yang besar, jika membayar lebih mahal, maka yang membayar mahal itulah yang akan menjadi tuannya. Hal itu juga nantinya berpengaruh terhadap keamanan negara, Machiavelli berpendapat bahwa dalam setiap pemerintahan, akan selalu ada ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, Machiavelli menekankan untuk memperkuat sektor keamanan demi berlangsungnya pemerintahan. Karena angkatan bersenjata yang baik akan menjamin sistem hukum yang baik dan juga keamanan negaranya.²⁵

Pandangan ini diadopsi oleh Hitler dengan membangun basis militernya sendiri (*Wehrmacht*), mulai dari adanya satuan keamanan bentukan NAZI, *Schutzstaffel*, lalu ada Gestapo (*Geheime Staatspolizei*) atau Polisi Politik Jerman, yang di kemudian hari menjadi kaki tangan yang sangat brutal dalam mewujudkan hasrat politik NAZI (Adolf Hitler). Dan satuan-satuan tentara tiga matra, angkatan darat, laut dan udara. Hitler betul-betul memperhatikan bagaimana keamanan dan pertahanan harus dibangun dengan sangat kuat demi menunjang keberhasilan negara dalam mewujudkan supremasi ras arya. Hal ini semakin menjelaskan bahwa pandangan Machiavelli betul-betul diadopsi dengan cermat oleh Hitler dalam proses pemerintahannya.

²⁵ Dr. M. Sastrapratedja & Drs. Frans M. Parera, *Op.Cit.*, Hlm. 36

1.2 Gagasan *Übermensch* dari Friedrich Nietzsche

Secara harfiah, *Übermensch* bisa diartikan sebagai “Manusia Atas” atau kita bisa memahaminya sebagai manusia-manusia yang diberi kelebihan diatas rata-rata, dalam gagasan ini, Nietzsche menggambarkan sebuah kelompok kecil manusia yang memiliki keunggulan dibanding kebanyakan manusia. Dalam catatan Nietzsche, *Übermensch* berkaitan dengan gagasan awalnya terkait budaya, yang mana dalam catatannya, Nietzsche menyebut bahwa tujuan kebudayaan itu sendiri adalah guna menghasilkan generasi-generasi jenius yang memberi makna pada kehidupan.²⁶ Gagasan terkait *Übermensch* ini sejatinya membicarakan tentang hakikat manusia, dimana manusia menurut Nietzsche yang layak untuk berada di bumi adalah manusia-manusia yang memiliki nilai di level atas dibanding manusia-manusia lain. Gagasan manusia atas ini digambarkan oleh Nietzsche dengan gambaran manusia yang sedikit, dimana manusia atas bisa terbilang, sementara manusia kawanan atau manusia biasa bersifat kelompok, maka bagi Nietzsche, manusia atas bisa dikategorikan sebagai individu yang memiliki kuasa yang tinggi dalam kehidupan.

Gagasan Nietzsche ini diadopsi oleh Hitler sebagai bagian dari pola pemikirannya dalam proses ia memerintah Jerman, ketika ia meggaungkan supremasi ras arya, ia membuat sebuah penggambaran ras arya yang memiliki tingkatan yang berbeda dengan ras lain, ia menggambarkan ras arya sebagai ras sempurna yang dinilai layak untuk menguasai Jerman bahkan dunia, Hitler menganggap bahwa ras lain hanya sebagai beban dan berpotensi membuat negara menjadi hancur jika dibiarkan tumbuh.

²⁶ Budi Hardiman, *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern*, Hlm. 238

Contoh aktualisasi dari gagasan ini ketika di jaman Hitler adalah dengan adanya konsep supremasi ras arya, Hitler melalui Nazi, berusaha membuat catatan medis guna membuktikan bahwa ras arya merupakan ras unggul,²⁷ hal itu ditujukan agar masyarakat mendukung gagasan supremasi ras arya yang digaungkan Hitler.

Dalam bukunya, Hitler memperlihatkan betapa pentingnya ras arya bagi kehidupan, bahkan ia menulisnya dalam satu bab penuh demi menjelaskan betapa krusialnya peran ras Arya dalam menguasai peradaban dunia.

Sejalan dengan apa yang Nietzsche jelaskan tentang konsep *Übermensch*, dalam praktiknya, Nietzsche juga menyoroti peran sikap *durchschnittlich* (rata-rata/tengah-tengah) yang tumbuh dalam kebudayaan, sikap tersebut dianggap dapat merusak bakat-bakat yang dihasilkan dari kebudayaan, sehingga membuat individu-individu berbakat tersebut malah cenderung masuk ke dalam kelompok manusia kewanan ketimbang manusia atas. Contoh sikap *durchschnittlich* terdapat dalam Nasionalisme, negara nasional hanya menumbuhkan kerumunan manusia, yang itu artinya, negara nasional hanya membentuk manusia kelas rata-rata dan menahan pertumbuhan manusia kelas atas, sehingga hasilnya adalah manusia yang tumbuh dalam lingkup Nasionalisme hanya akan berupa manusia biasa.

Dari gagasan tersebut, Hitler mencoba mengubah konsep nasionalisme yang dijelaskan oleh Nietzsche agar lebih relevan dengan apa yang ia bawa dalam misinya, ia menggunakan prinsip nasionalisme penuh atau kepatuhan

²⁷ *Ensiklopedi Holocaust* : <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/racism-abridged-article> diakses tanggal : 19 Juli 2023.

penuh kepada negara (*Chauvinisme*) sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Itulah mengapa dalam konsep kekuasaannya, fasisme tumbuh subur, karena ini berkaitan dengan prinsip negara sebagai subyek utama dalam pemerintahan dan rakyat harus tunduk secara penuh pada kehendak negara. Hal itu juga secara tidak langsung mengaktualisasikan sifat dasar Hitler yang sangat cinta terhadap Jerman, meskipun ia terlahir bukan sebagai warga berdarah Jerman murni.

Jadi, gagasan *ubermensch* ini memiliki keterkaitan dengan ideologi fasisme, dan menjadi salah satu dari sekian banyak akar pemikiran yang digunakan oleh ideologi ini.

1.3 Fasisme Nazi

Fasisme merupakan ideologi yang lahir sebagai antitesis dari intelektualisme dan dogmatisme. Fasisme ini juga merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebebasan individu dan kebebasan berfikir.²⁸ “Rasa Memiliki” dari masyarakat era fasisme ini cenderung rendah, bahkan tidak ada, itulah mengapa hal tersebut menjadi gerbang utama masuk dan tumbuhnya Fasisme di suatu negara. Fasisme juga bisa muncul di masyarakat pos-demokrasi, artinya fasisme ini berpeluang besar muncul di dalam lingkungan masyarakat yang sudah tidak yakin dengan sistem demokrasi, karena menganggap demokrasi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Fasisme menekankan pada masyarakat bahwa semua hal biarkan diatur mutlak oleh pemerintah, selama itu demi kebaikan negara. Doktrin tersebut berhasil diterapkan di beberapa negara terutama di era perang dunia kedua, beberapa

²⁸ Nur Sayyid Santoso Kristeva. M.A. *Sejarah Ideologi Dunia*, Hlm. 75

contoh terkenalnya adalah Fasisme Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini dan Fasisme Nazi (Nazisme) Jerman yang digawangi oleh Adolf Hitler.

Khusus untuk Fasisme Nazi Jerman, Hitler menambahkan variabel lain dalam teori fasis versinya. Dalam teori Fasisme Jerman, Hitler menambahkan variabel rasisme sebagai bagian dari pondasi teori Fasis yang ia anut. Variabel rasisme ini lah yang membuatnya merasa leluasa untuk melakukan tindakan pembasmian terhadap kaum-kaum yang dianggap rendah.²⁹

Pemikiran Fasisme Jerman yang dibawa Hitler ini membuat semakin acaknya definisi dari Fasisme itu sendiri. Dikutip dari beberapa sumber, fasisme merupakan kombinasi dari berbagai teori ekstrem yang saling berkaitan, mencakup didalamnya soal ras, sosial, agama, ekonomi dan moralitas. Dalam pandangan Fasisme Nazi, pemerintahan absolut merupakan sebuah unsur inti teori, sementara unsur-unsur lain (ras, agama, sosial, ekonomi dan moral) akan dianggap ada jika mampu berkontribusi bagi negara. Ras akan dianggap sebagai ancaman jika didalamnya terdapat satu atau dua atau bahkan lebih ras atau etnis yang hidup. Keberagaman ras ini membuat adanya ketidakstabilan dalam pemerintah karena beragamnya pemikiran dan tujuan dari dikemukakannya pemikiran tersebut. Hal tersebut dapat menghambat proses berkembangnya negara.

Dalam kasus Jerman era Nazi, Hitler membangun narasi Ras Arya sebagai ras tunggal penguasa dan pemilik tanah Jerman sebagai bagian dari Fasisme Nazi. Hal tersebut didasari oleh pengalaman Hitler sendiri ketika perang dunia pertama. Dimana pada saat itu, Jerman menjadi pihak yang sangat dirugikan.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 77

Hitler melihat bahwa etnis atau ras lain tidak memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, selain itu, keberadaan ras-ras rendah ini semakin memperberat beban negara disaat Jerman mengalami krisis ekonomi pasca perang.

2. Penelitian terdahulu

Pada naskah penelitian ini, penulis berusaha menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

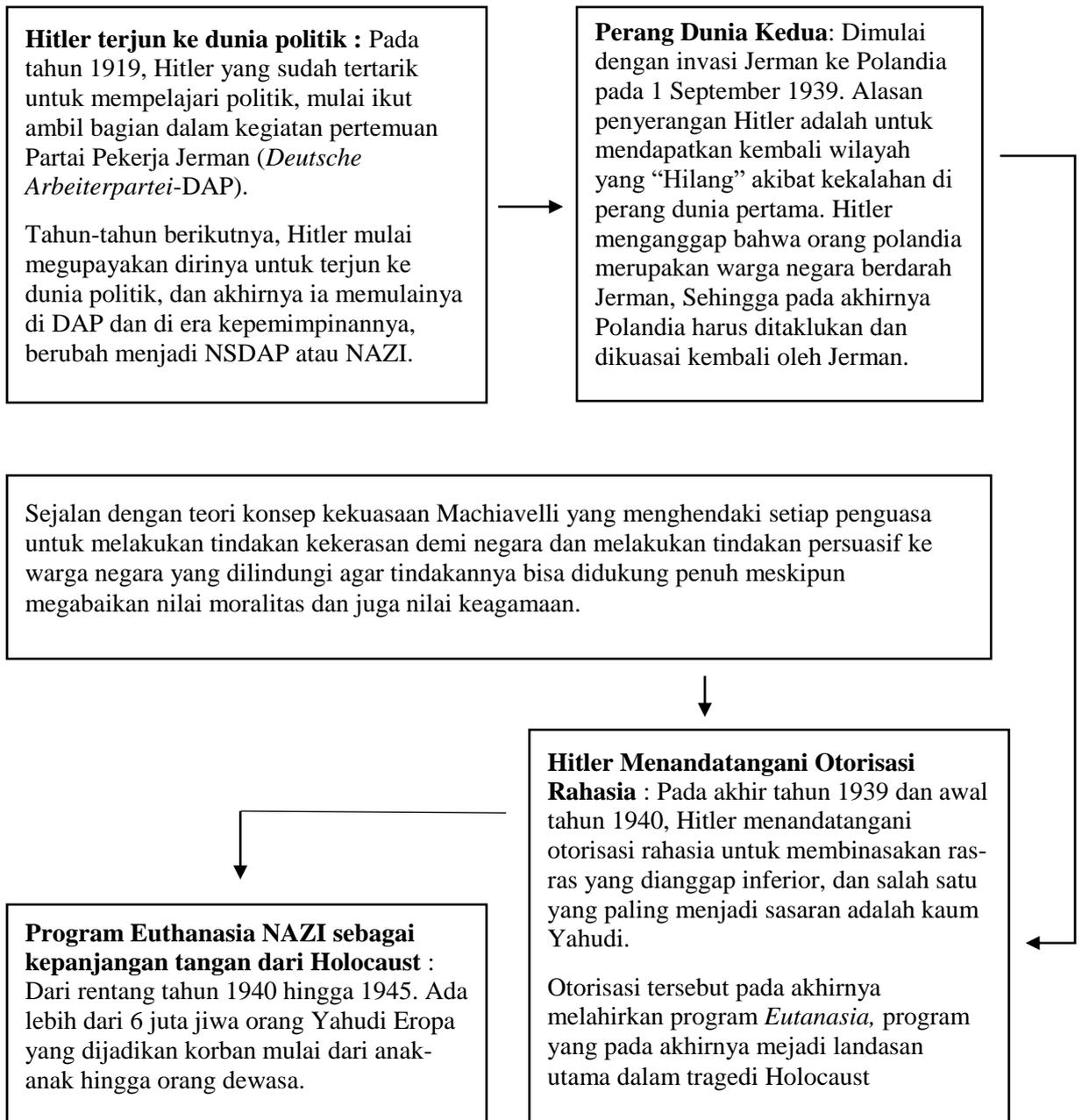
Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Robiah Aladawiyah, (Skripsi, 2019) Perilaku Politik Adolf Hitler dan Mu'awiyah (Tinjauan Filsafat Etika)	Menganalisis mengenai konsep meraih kekuasaan dalam pemerintahan dengan objek utama penelitian utama salah satunya adalah Adolf Hitler.	Perbedaannya yaitu terletak dari fokus utama dari penelitian lebih kepada perilaku politik secara personal dari Adolf Hitler dan Muawiyah.
2	Ario Rahmana, (Skripsi, 2014) Ideologi Fasisme (Pemikiran Adolf Hitler atas Konsep Fasisme di Jerman)	Sama-sama meneliti dan menganalisis pemberlakuan ideologi Fasisme di Jerman yang merupakan hasil	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian utama yang hanya berfokus pada penelitian terkait pemberlakuan Ideologi Fasisme saja

		<p> sintesis Adolf Hitler terkait titik klimaks perseteruan antara suku asli Jerman (bangsa Arya) dan suku Yahudi.</p>	<p> dan masalah isu Ras Arya hanya menjadi salah satu bagian kecil dari objek penelitian utama yang dibahas.</p>
3	<p> Endah Yani Anggraeni (Skripsi, 2013) Peranan Adolf Hitler dalam Perjuangan Politik Partai Nazi di Jerman Tahun 1933-1945</p>	<p> Salah satu objek bahasan dari penelitian ini adalah terkait dampak implementasi kebijakan Hitler di Jerman pada tahun 1933-1945 (dalam hal ini terkait kebijakan Holocaust dan program genosida terhadap Ras Inferior termasuk Yahudi Eropa guna melancarkan ambisinya menancapkan</p>	<p> Perbedaannya terletak pada pokok bahasan yang hanya terfokus secara spesifik membahas mengenai kontribusi Hitler bagi partai Nazi. Dan isu ras hanya menjadi salah satu bagian dari materi penelitian.</p>

		supremasi Ras Arya di Jerman)	
--	--	----------------------------------	--

3. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dari naskah usulan penelitian ini dimulai dengan gambaran umum perkembangan pemikiran politis seorang Hitler yang awalnya hanya tertarik dengan kepribadian pemerintah tempat ia tinggal semetara saat di Austria, hingga pada akhirnya sampai pada kejadian perang dunia kedua. Pada perang dunia kedua inilah terdapat satu tragedi yang diinisiasi oleh NAZI,

yakni tragedi *Holocaust*. Tragedi ini terjadi bersamaan dengan invasi Jerman ke Polandia yang menyebabkan Inggris dan Perancis akhirnya bereaksi dan ikut membantu Polandia untuk bertempur dengan Jerman. Hitler sebagai pemimpin Jerman saat itu menerapkan kebijakan Holocaust sebagai tindak lanjut dari pemikiran rasialnya terhadap kaum-kaum yang dianggap menghambat pertumbuhan supremasi ras Arya di Jerman. Salah satu yang paling disorot adalah keberadaan kaum Yahudi. *Eutanasia* menjadi program yang digunakan untuk melancarkan gerakan *Holocaust* guna membersihkan Jerman dari pengaruh ras-ras selain Ras Arya yang menjadi akar pemikiran Hitler dalam menjalankan gerakan *Holocaust* tersebut. Dalam naskah usulan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, dimana dalam proses pengerjaannya, peneliti banyak menggunakan dokumen-dokumen tertulis seperti buku karangan Hitler yakni *Mein Kampf* yang sudah diterjemahkan dan arsip-arsip sejarah serta buku-buku yang menunjang validitas data dari penelitian yang diambil.